

Kedudukan Minuta Akta Mengenai Peralihan Kepengurusan Persekutuan Komanditer Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 190/PDT.G/2022/PN.SMR) = The Legal Status Of a Deed Regarding The Transfer Of Management Of A Limited Partnership That Is Not Signed In Front Of Notary (A Study Of The Samarinda District Court Decision Number 190/PDT.G/2022/PN.SMR)

Merry Kalyana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920566302&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peralihan kepengurusan persekutuan komanditer berdasarkan peraturan yang berlaku serta tanggung jawab notaris dan kedudukan minuta akta peralihan persekutuan komanditer yang dikirimkan kepada beberapa pihak di dalam akta, dikaitkan dengan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN.SMR. Penelitian disusun menggunakan penelitian hukum doktrinal. Peralihan kepengurusan persekutuan komanditer harus dilakukan melalui akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dan disampaikan kepada Kemenkumham melalui SABU (Pasal 15 Permenkumham 17/2018). Ketidakhadiran beberapa pihak dalam akta peralihan kepengurusan di dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN.SMR menyebabkan tidak lahirnya perbuatan hukum atau seolah-olah peralihan kepengurusan tersebut tidak pernah terjadi (non eksistent). Tindakan pengurus lama yang merugikan pengurus baru dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara. Kedudukan minuta akta peralihan yang dikirim oleh notaris kepada para penghadap untuk ditandatangani, akan berdampak pada status akta menjadi non eksistent karena notaris memiliki kewajiban melakukan pembacaan dan penandatanganan di hadapan para penghadap (Pasal 16 ayat (1) UUJN). Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris.

.....This research analyzes the transsition of management in limited partnership, based on applicable regulations, along with the responsibilities of the notary and the legal status of the deed of management transition sent to certain parties, focusing on court decision Number 190/PDT.G/2022/PN.SMR. Using a doctrinal legal research method, the study highlights the requirements of Article 15 of the Minister of Law and Human Rights Regulation 17/2018, which mandates a formal amendment to the partnership agreement, drafted by a notary and submitted to the Ministry of Law and Human Rights, via SABU. In Decision No. 190/Pdt.G/2022/PN.SMR, the absence of several parties in the deed of transfer of management rendered the act legally non-existent. The old management may be held liable for any actions that harm the new management (Article 1131 of the Civil Code). The status of the deeds management transition dees sent by the notary to the parties for signature impacts the validity of the deed, rendering it non-existent, because the deed must be executed in the presence of a notary to be considered valid (Aricle 16 paragraph (1) m of the notary law). Moreover, notaries who commit such violations may be subject to sanction by the notary supervisory council.